p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Kebijakan Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan: Strategi Akselerasi Status Unggul Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan Berbasis Analisis Sosial Ekonomi

Educator and Education Personnel Capacity Enhancement Policy: Acceleration Strategy for Excellence Status of Marine and Fisheries Higher Education Based on Socio-Economic Analysis

***Suryat Dedie Susena**

Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan
Jl. Medan Merdeka Timur No.16, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia

ARTICLE INFO

Diterima tanggal : 23 Desember 2025
Perbaikan naskah: 17 Maret 2026
Disetujui terbit : 15 April 2026

*Korespodensi penulis:
Email: suryongawiyat.dedie1980@gmail.com

DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v16i1.19775

ABSTRAK

Rendahnya mutu pendidikan tinggi sektor kelautan dan perikanan memiliki implikasi sosial ekonomi yang signifikan, menghambat kesiapan tenaga kerja maritim dalam menghadapi persaingan global dan menekan potensi kesejahteraan masyarakat pesisir. Masalah struktural yang meliputi kesenjangan kompetensi pendidik, disparitas sarana prasarana, inefisiensi tata kelola, dan keterbatasan pendanaan menjadi penghalang utama pencapaian status Akreditasi Unggul. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan strategis guna mengatasi hambatan tersebut. Menggunakan metode analisis kebijakan *Bardach's Eightfold Path* dan kerangka *Avoid-Shift-Improve*, studi ini menganalisis data sekunder hasil monitoring evaluasi tahun 2019-2023,berupa data akreditasi dan monitoring satuan pendidikan . Temuan menunjukkan bahwa intervensi pada kapasitas modal manusia (*human capital*) memberikan dampak pengganda (*multiplier effect*) ekonomi terbesar. Rekomendasi utama kajian ini menekankan penguatan kompetensi dan pemerataan pendidik melalui regulasi terintegrasi dan sinergi lintas sektor untuk meningkatkan mutu pendidikan dan daya saing sektor kelautan dan perikanan. Hal ini diharapkan dapat mengakselerasi peningkatan mutu pendidikan, menciptakan tenaga kerja terampil, dan mendorong pertumbuhan ekonomi sektor kelautan yang inklusif.

Kata Kunci: mutu pendidikan; kebijakan sosial ekonomi; kompetensi pendidik; daya saing maritim; status unggul; modal manusia

ABSTRACT

The low quality of higher education in the marine and fisheries sector carries significant socio-economic implications, hindering the readiness of the maritime workforce to face global competition and suppressing the potential welfare of coastal communities. Structural issues encompassing gaps in educator competency, infrastructure disparities, governance inefficiencies, and funding constraints serve as primary barriers to achieving "Excellent" accreditation status. This paper aims to formulate strategic policy recommendations to overcome these obstacles. Utilizing Bardach's Eightfold Path policy analysis method and the Avoid-Shift-Improve framework, this study analyzes secondary data from monitoring and evaluation reports spanning 2019-2023. Findings indicate that interventions in human capital capacity yield the largest economic multiplier effect. The main recommendation emphasizes strengthening educator competencies and ensuring equitable distribution through integrated regulations and cross-sectoral synergy to enhance education quality and the competitiveness of the marine and fisheries sector. This is expected to accelerate education quality improvement, create a skilled workforce, and promote inclusive economic growth in the marine sector.

Keywords: education quality; socio-economic policy; educator competency; maritime competitiveness; excellence status; human capital.

PENDAHULUAN

Sektor kelautan dan perikanan merupakan pilar strategis dalam perekonomian Indonesia, yang tidak hanya berkontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional tetapi juga menjadi sandaran hidup bagi jutaan masyarakat pesisir. Visi Indonesia 2045 untuk menjadi poros maritim dunia menuntut ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, kompetitif, dan adaptif terhadap dinamika global. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) antara potensi ekonomi maritim yang besar dengan kualitas modal manusia yang dihasilkan oleh institusi pendidikan vokasi dan tinggi di sektor ini. Pendidikan bukan sekadar proses transfer pengetahuan, melainkan investasi sosial ekonomi jangka panjang yang krusial untuk memutus rantai kemiskinan struktural di wilayah pesisir.

Secara empiris, kondisi ini tercermin dari profil pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan tinggi kelautan dan perikanan yang masih menghadapi tantangan kualitas dan distribusi. Berdasarkan data tahun 2024, jumlah dosen tersebar di berbagai satuan pendidikan, antara lain STP Jakarta (112 orang), Politeknik KP

Jembrana (34 orang), Karawang (44 orang), Kupang (26 orang), Pangandaran (30 orang), Sidoarjo (53 orang), Sorong (31 orang), Tegal (22 orang), Bitung (37 orang), Bone (23 orang), Dumai (23 orang), serta Akademi Perikanan Wakatobi (11 orang). Pada tingkat menengah, jumlah pendidik di SUPM Ambon (14 orang), SUPM Pariaman (15 orang), dan SUPM Ladong Aceh (8 orang). Meskipun secara kuantitas relatif mencukupi, secara kualitas masih terdapat kesenjangan, di mana sebagian pendidik belum sepenuhnya memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan, baik dalam hal sertifikasi profesional, kualifikasi akademik, maupun penguasaan teknologi pembelajaran digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas pendidik menjadi isu krusial dalam mendorong mutu pendidikan.

Tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah rendahnya mutu pendidikan di Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan, yang tercermin dari minimnya jumlah satuan pendidikan berstatus "Unggul". Indikator ini mencerminkan belum optimalnya standar pendidikan yang diterapkan, yang secara langsung berdampak pada rendahnya daya saing lulusan di pasar kerja. Kondisi ini dipicu oleh empat faktor fundamental yang saling berkaitan: (1) kualitas dan distribusi pendidik yang belum merata, (2) standar sarana dan prasarana yang belum memadai, (3) inefisiensi pengelolaan pendidikan, dan (4) pendanaan yang belum optimal. Keempat aspek ini menciptakan hambatan sosial ekonomi, di mana lulusan tidak terserap optimal oleh industri, sehingga menghambat mobilitas sosial vertikal bagi peserta didik yang mayoritas berasal dari keluarga pelaku utama perikanan.

Permasalahan ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) khususnya Tujuan 4 (Pendidikan Berkualitas) dan Tujuan 14 (Ekosistem Lautan), di mana pendidikan berkualitas menjadi prasyarat bagi pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Berdasarkan data Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan (2024), mayoritas satuan pendidikan masih berada pada level "Baik Sekali" atau "Baik", dan belum ada yang mencapai predikat "Unggul". Stagnasi ini berisiko memperlambat transisi menuju ekonomi biru yang berbasis pengetahuan (*knowledge-based blue economy*).

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi kebijakan yang tajam dan implementatif guna meningkatkan mutu pendidikan, dengan fokus khusus pada dimensi peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan. Analisis ini memberikan kontribusi pada literatur kebijakan sosial ekonomi dengan menawarkan perspektif bahwa perbaikan mutu pendidik adalah intervensi paling efisien (*cost-effective*) untuk menghasilkan dampak ekonomi luas, dibandingkan investasi fisik semata.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis kebijakan untuk mengidentifikasi kesenjangan dan merumuskan solusi yang berbasis bukti. Secara spesifik, penelitian ini menjawab pertanyaan 5W+1H sebagai berikut: (*what*) aspek yang dikaji adalah kompetensi dan distribusi pendidik serta tenaga kependidikan; (*who*) unit analisis mencakup dosen pendidikan tinggi kelautan dan perikanan; (*when*) periode analisis dilakukan pada data tahun 2019–2023; (*where*) mencakup seluruh satuan pendidikan KP di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan; (*why*) untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi aktual dengan standar yang diharapkan; dan (*how*) melalui analisis dokumen sekunder, regulasi, serta validasi melalui diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*) dengan pemangku kepentingan kunci seperti pimpinan politeknik dan tim kerja teknis.

Kerangka analisis kebijakan mengadopsi The Eightfold Path dari Bardach (2012), yang dioperasionalkan dalam tahapan: (1) definisi masalah berbasis gap kompetensi dan distribusi pendidik, (2) pengumpulan dan sintesis bukti dari data monitoring dan evaluasi, (3) perumusan alternatif kebijakan menggunakan pendekatan Avoid–Shift–Improve, (4) penentuan kriteria evaluasi (efektivitas, efisiensi, dan dampak jangka panjang), (5) proyeksi hasil dari setiap alternatif, dan (6) perumusan rekomendasi kebijakan prioritas. Proses penentuan prioritas dilakukan melalui metode skoring dalam FGD terbatas yang melibatkan key persons. Selanjutnya, untuk memastikan keterkaitan antara desain kebijakan dan implementasi, digunakan pendekatan Logic Model (Knowlton & Phillips, 2013) guna memetakan hubungan kausal antara input, aktivitas, output, outcome, dan dampak kebijakan. Dengan alur ini, penelitian mampu secara sistematis mengidentifikasi kesenjangan dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang operasional dan implementatif.

Penguatan *Human Capital* Pendidikan Maritim Melalui Kemitraan dan Manajemen Mutu

Teori *Human Capital* menempatkan manusia sebagai faktor produksi strategis yang menentukan daya saing ekonomi melalui investasi pada pendidikan dan pelatihan (Fitz-Enz, 2000; Kasmawati, 2017). Dalam konteks sektor kelautan dan perikanan, khususnya pendidikan maritim,

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

pendidik yang kompeten bukan sekadar pelaksana kurikulum, melainkan *knowledge carrier* yang berperan mentransformasikan peserta didik menjadi tenaga kerja terampil, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan industri perikanan modern. Peningkatan kualitas human capital pada level pendidik akan menghasilkan *spillover effect* berupa peningkatan kompetensi lulusan yang selaras dengan tuntutan industri 4.0, termasuk digitalisasi perikanan, otomasi, dan keberlanjutan sumber daya.

Namun, investasi human capital dalam pendidikan maritim tidak dapat dilepaskan dari keterbatasan fiskal negara. Kondisi ini menuntut pendekatan inovatif melalui skema *Public-Private Partnership* (PPP) yang menekankan kolaborasi strategis antara pemerintah, institusi pendidikan, dan dunia industri (Suryadi, 2025). Dalam kerangka PPP, industri tidak hanya berperan sebagai pengguna lulusan, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam penyediaan fasilitas praktik, penyelarasan kurikulum, dan transfer teknologi. Praktik ini telah terbukti efektif di berbagai negara, seperti model *Dual System* di Jerman yang mengintegrasikan pembelajaran teori dan praktik industri (Euler, 2013), serta sistem pendidikan vokasi di Finlandia yang menempatkan industri sebagai bagian dari ekosistem pendidikan (Stenström & Laine, 2011). Penerapan PPP dalam pendidikan kelautan Indonesia berpotensi mengurangi beban fiskal negara sekaligus memperkuat *link and match* antara suplai lulusan dan kebutuhan riil pasar kerja sektor perikanan.

Agar investasi pada human capital dan infrastruktur pendidikan memberikan hasil optimal, diperlukan kerangka pengelolaan mutu yang sistematis. Pendekatan *Total Quality Management* (TQM) dalam pendidikan tinggi menekankan perbaikan berkelanjutan berbasis data, keterlibatan pemangku kepentingan, serta orientasi pada kepuasan pengguna lulusan (Darmawan et al., 2021). Sejalan dengan itu, *Educational Infrastructure Theory* menyatakan bahwa kualitas sarana dan prasarana pembelajaran berkorelasi positif dengan efektivitas proses belajar-mengajar (Nelliraharti & Jarmita, 2025). Meski demikian, dari perspektif ekonomi kelembagaan, pembangunan infrastruktur fisik tanpa dukungan tata kelola yang efisien berisiko menghasilkan *stranded assets*, yaitu aset yang tidak termanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, penguatan human capital, kemitraan pemerintah-swasta, dan penerapan manajemen mutu terpadu harus dipandang sebagai satu kesatuan kebijakan yang saling memperkuat dalam pembangunan pendidikan maritim yang berkelanjutan.

TANTANGAN MENUJU STATUS UNGGUL

Berdasarkan data Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan (2024), peta akreditasi institusi pendidikan tinggi kelautan dan perikanan menunjukkan indikasi stagnasi mutu kelembagaan. Dari total 11 Satuan Pendidikan Tinggi, sebanyak 8 institusi berstatus "Baik Sekali", 2 berstatus "Baik", dan 1 belum terakreditasi. Tidak adanya satu pun institusi yang mencapai peringkat "Unggul" mengindikasikan bahwa sistem pendidikan yang berjalan belum mampu menembus standar mutu tertinggi yang dipersyaratkan dalam ekosistem pendidikan tinggi nasional, apalagi dalam konteks persaingan global. Dalam perspektif pasar tenaga kerja internasional, ketiadaan institusi berstatus unggul berimplikasi pada rendahnya *signaling effect* kualitas lulusan, sehingga daya tawar (bargaining position) lulusan di pasar kerja global sektor maritim menjadi terbatas.

Kondisi stagnasi mutu tersebut diperkuat oleh hasil Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan periode 2019–2023 sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Secara agregat, seluruh standar memperoleh nilai di atas ambang batas kelayakan, namun belum menunjukkan keunggulan kompetitif. Standar Kompetensi Lulusan memperoleh skor relatif tinggi (88,59), yang secara normatif mencerminkan bahwa capaian pembelajaran telah dirancang selaras dengan regulasi. Namun, capaian ini belum sepenuhnya ditopang oleh faktor input dan proses yang memadai.

Dua komponen dengan skor terendah, yakni Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tabel 1. Nilai Rerata Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan (2019-2023).

No	Komponen / Standar	Rata-Rata Total (2019-2023)
1	Standar Isi	86,89
2	Standar Proses	85,88
3	Standar Kompetensi Lulusan	88,59
4	Standar Pendidik & Tenaga Kependidikan	81,70
5	Standar Sarana dan Prasarana	80,82
6	Standar Pengelolaan Pendidikan	86,08
7	Standar Pembiayaan	83,30
8	Standar Penilaian Pendidikan	84,91

(81,70) serta Standar Sarana dan Prasarana (80,82), merupakan titik kritis dalam perspektif sosial ekonomi pendidikan. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana berdampak langsung pada keterbatasan akses peserta didik terhadap teknologi mutakhir,

khususnya peralatan praktik, laboratorium simulasi, dan *training facilities* yang merepresentasikan kondisi industri perikanan modern. Ketertinggalan ini menciptakan kesenjangan antara *learning environment* di institusi pendidikan dan *working environment* di dunia industri.

Pada saat yang sama, rendahnya skor Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan mengindikasikan belum optimalnya kapasitas pedagogik, profesional, dan industri dari tenaga pengajar. Dalam konteks pendidikan vokasi dan terapan, pendidik berperan penting dalam mentransfer *tacit knowledge*, yaitu pengetahuan implisit yang tidak tertulis namun krusial dalam praktik kerja nyata. Keterbatasan kompetensi pendidik, khususnya dalam penguasaan teknologi baru dan pengalaman industri terkini, menghambat proses internalisasi keterampilan tersebut kepada peserta didik.

Dari sudut pandang ekonomi pendidikan, kondisi ini menciptakan inefisiensi investasi publik. Negara telah mengalokasikan anggaran signifikan untuk penyelenggaraan pendidikan, namun hasil akhirnya belum sepenuhnya menghasilkan lulusan yang *job-ready*. Akibatnya, dunia usaha dan industri harus menanggung biaya tambahan berupa *retraining* dan *upskilling* bagi lulusan baru sebelum dapat bekerja secara produktif. Fenomena ini menunjukkan terjadinya *cost shifting* dari sektor publik ke sektor swasta, sekaligus menandakan belum optimalnya fungsi pendidikan sebagai mekanisme pembentukan human capital yang efisien.

Lebih jauh, ketimpangan antara standar kompetensi lulusan yang relatif tinggi dan lemahnya standar pendidik serta sarana prasarana mencerminkan adanya *structural mismatch* dalam tata kelola pendidikan. Kurikulum dan capaian pembelajaran telah dirancang progresif, tetapi belum sepenuhnya didukung oleh kapasitas kelembagaan dan infrastruktur yang memadai. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menurunkan kredibilitas institusi pendidikan kelautan dan perikanan, serta memperlemah kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi maritim yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Tabel 2 menunjukkan bahwa permasalahan utama pendidikan tinggi kelautan dan perikanan terletak pada dimensi kualitas dan distribusi *human capital* pendidik yang belum optimal dan berdampak langsung terhadap kinerja sistem pendidikan serta implikasi sosial ekonomi yang lebih luas. Dari aspek kompetensi, skor standar pendidik yang masih berada pada level 81,70 mengindikasikan belum tercapainya ambang batas mutu unggul (≥90), yang secara fungsional berkontribusi pada rendahnya kesiapan kerja lulusan dan meningkatnya biaya penyesuaian (*retraining cost*) di tingkat industri. Pada aspek distribusi, konsentrasi pendidik di wilayah tertentu—terutama di kawasan maju—mencerminkan adanya ketimpangan spasial yang signifikan, sehingga wilayah 3T mengalami defisit tenaga pendidik berkualitas yang pada akhirnya memperlebar disparitas kualitas pendidikan dan ketimpangan ekonomi antarwilayah.

Selanjutnya, rendahnya literasi digital pendidik memperlihatkan adanya kesenjangan antara kapasitas aktual dengan tuntutan transformasi pendidikan berbasis teknologi dan kebutuhan industri 4.0, yang berdampak pada lambatnya adopsi inovasi dalam proses pembelajaran. Kondisi ini diperparah oleh belum terbangunnya sistem pengembangan kapasitas berkelanjutan (*continuous professional development*) yang terstruktur, sehingga peningkatan kompetensi cenderung sporadis dan tidak sistematis, mengakibatkan stagnasi kualitas pendidik dalam jangka panjang. Selain itu, keterbatasan *link and match* dengan industri menunjukkan bahwa proses pendidikan belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika pasar kerja, yang berimplikasi pada terjadinya *skills mismatch* antara lulusan dan kebutuhan sektor perikanan.

Tabel 2. Kesenjangan (Gap) Human Capital Pendidik dan Dampak Sosial Ekonomi.

Aspek	Kondisi Aktual (Data Monev 2019–2023)	Kesenjangan (Gap)	Dampak Sosial Ekonomi
Kompetensi Pendidik	Skor standar pendidik 81,70 (terendah ke-2)	Belum memenuhi standar unggul (≥90)	Lulusan kurang siap kerja, biaya retraining industri meningkat
Distribusi Pendidik	Terkonsentrasi di wilayah Jawa	Ketimpangan antar wilayah (3T kekurangan SDM)	Disparitas kualitas lulusan dan ketimpangan ekonomi regional
Literasi Digital	Penguasaan teknologi belum merata	Gap terhadap kebutuhan industri 4.0	Keterlambatan adaptasi teknologi sektor perikanan
Pengembangan Kapasitas	Pelatihan belum berkelanjutan	Tidak ada sistem CPD terstruktur	Stagnasi kompetensi pendidik
Link & Match Industri	Kolaborasi masih terbatas	Kurikulum belum sepenuhnya berbasis industri	Mismatch lulusan dengan kebutuhan pasar kerja

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Secara keseluruhan, pola yang muncul dari matriks tersebut menegaskan bahwa kesenjangan pada aspek pendidik tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan sistemik, dengan efek berantai terhadap kualitas lulusan, produktivitas sektor, hingga ketimpangan sosial ekonomi. Dengan demikian, intervensi kebijakan yang berfokus pada peningkatan kompetensi, pemerataan distribusi, dan penguatan kapasitas adaptif pendidik menjadi titik ungkit (*leverage point*) paling strategis dalam mendorong transformasi pendidikan tinggi kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Identifikasi Permasalahan Kritis Berdimensi Sosial Ekonomi

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi kelautan dan perikanan tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi memiliki dimensi sosial ekonomi yang kuat dan saling terkait. Salah satu isu paling mendasar adalah kesenjangan kompetensi dan distribusi pendidik antarwilayah. Konsentrasi pendidik dengan kualifikasi dan pengalaman industri yang lebih baik masih terpusat di Pulau Jawa, sementara satuan pendidikan di luar Jawa yang justru berada dekat dengan pusat-pusat produksi perikanan mengalami keterbatasan sumber daya manusia pengajar. Ketimpangan distribusi ini menciptakan disparitas kualitas pendidikan, yang pada akhirnya memperlebar kesenjangan ekonomi regional karena lulusan dari wilayah tertinggal memiliki daya saing yang lebih rendah di pasar kerja nasional maupun global.

Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan akses pendidik di daerah terpencil terhadap pelatihan teknologi dan pengembangan kompetensi berkelanjutan. Minimnya kesempatan *upskilling* dan *reskilling*, baik karena keterbatasan anggaran maupun kendala geografis, menyebabkan terjadinya *knowledge gap* antara pendidik di wilayah maju dan wilayah tertinggal. Dalam konteks transformasi sektor perikanan menuju digitalisasi dan industrialisasi berkelanjutan, ketertinggalan ini berdampak langsung pada kualitas proses pembelajaran dan relevansi kompetensi lulusan. Secara sosial ekonomi, situasi ini menciptakan lingkaran ketertinggalan (*vicious cycle*) di mana wilayah dengan kapasitas pendidikan rendah terus tertinggal dalam pembangunan ekonomi maritim.

Permasalahan krusial lainnya adalah inefisiensi pengelolaan dan keterbatasan pembiayaan pendidikan. Pola pengelolaan yang belum sepenuhnya berbasis data (*data-driven management*) mengakibatkan perencanaan dan alokasi sumber daya yang kurang tepat sasaran. Keputusan investasi seringkali tidak didukung oleh analisis kebutuhan riil, proyeksi pasar tenaga kerja, maupun kinerja kelembagaan secara longitudinal. Akibatnya, terdapat risiko duplikasi program, ketidakseimbangan antarunit, serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang belum optimal. Di sisi pembiayaan, keterbatasan APBN menjadi kendala struktural yang semakin signifikan di tengah meningkatnya tuntutan modernisasi pendidikan. Meskipun skema Badan Layanan Umum (BLU) memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan, pemanfaatan aset dan potensi pendapatan non-APBN masih belum optimal. Demikian pula, peluang kemitraan dengan sektor swasta belum dimanfaatkan secara strategis untuk mendukung pembaruan fasilitas, pengadaan teknologi pembelajaran mutakhir, maupun penguatan kapasitas pendidik. Keterbatasan ini menghambat kemampuan institusi pendidikan untuk beradaptasi dengan dinamika industri perikanan global yang menuntut kecepatan inovasi dan efisiensi.

Alternatif Kebijakan dan Penentuan Prioritas

Mengacu pada pendekatan *Avoid–Shift–Improve* (ASI), perumusan alternatif kebijakan diarahkan untuk menghindari sumber inefisiensi struktural (*avoid*), menggeser pola pengelolaan yang kurang adaptif (*shift*), serta meningkatkan kinerja sistem pendidikan secara berkelanjutan (*improve*). Melalui proses *Focus Group Discussion* (FGD) terbatas yang melibatkan *key persons*, dilakukan penilaian terhadap empat alternatif kebijakan menggunakan tiga kriteria utama, yaitu efektivitas, efisiensi, dan dampak jangka panjang. Hasil penilaian disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Matriks Skoring Prioritas Kebijakan.

No	Alternatif Kebijakan	Efektivitas	Efisiensi	Dampak Jangka Panjang	Skor Total
1	Peningkatan Kompetensi dan Distribusi Pendidik & Tendik (Berbasis Teknologi & Sertifikasi)	5	4	5	**14**
2	Penguatan Sarana & Prasarana (Infrastruktur & Digital)	5	3	5	13
3	Reformasi Pengelolaan Pendidikan	4	4	3	11
4	Optimalisasi Pembiayaan Pendidikan	3	4	3	10

Alternatif kebijakan dengan skor tertinggi adalah peningkatan kompetensi dan distribusi pendidik serta tenaga kependidikan berbasis teknologi dan sertifikasi, dengan skor total 14. Tingginya skor efektivitas dan dampak jangka panjang mencerminkan pandangan bahwa kualitas pendidik merupakan *leverage point* utama dalam sistem pendidikan. Kebijakan ini dinilai mampu mengatasi permasalahan mendasar berupa kesenjangan kompetensi antarwilayah serta meningkatkan kapasitas pendidik dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi sektor perikanan. Dalam kerangka ASI, alternatif ini merepresentasikan strategi *improve* yang berorientasi pada penguatan human capital sebagai investasi jangka panjang dengan efek multiplikasi sosial ekonomi yang signifikan.

Alternatif kedua, yaitu penguatan sarana dan prasarana pendidikan, baik infrastruktur fisik maupun digital, memperoleh skor total 13. Skor efektivitas dan dampak jangka panjang yang tinggi menunjukkan bahwa modernisasi fasilitas pembelajaran dipandang krusial dalam mendukung proses pendidikan yang berkualitas dan adaptif terhadap kebutuhan industri. Namun, skor efisiensi yang relatif lebih rendah mencerminkan besarnya kebutuhan investasi awal dan keterbatasan fiskal negara. Dalam perspektif ASI, kebijakan ini berada pada spektrum *shift–improve*, yaitu menggeser model pembelajaran konvensional menuju ekosistem pembelajaran berbasis teknologi, sekaligus meningkatkan kualitas output pendidikan.

Sementara itu, reformasi pengelolaan pendidikan memperoleh skor total 11. Alternatif ini dinilai cukup efektif dan efisien dalam jangka pendek, khususnya melalui penerapan pengelolaan berbasis data dan penguatan tata kelola kelembagaan. Namun, dampak jangka panjangnya dinilai lebih moderat karena keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan kapasitas organisasi. Dalam kerangka ASI, reformasi pengelolaan berfungsi sebagai strategi *avoid*, yakni menghindari pemborosan sumber daya dan ketidaktepatan sasaran kebijakan melalui perbaikan sistem perencanaan dan pengambilan keputusan.

Alternatif dengan skor terendah adalah optimalisasi pembiayaan pendidikan, dengan skor total 10. Meskipun dinilai relatif efisien karena mendorong diversifikasi sumber pendanaan dan pemanfaatan skema BLU serta kemitraan swasta, alternatif ini memiliki keterbatasan dalam hal efektivitas dan dampak jangka panjang jika tidak disertai perbaikan kualitas pendidik dan sarana. Dalam kerangka ASI, kebijakan ini lebih bersifat *shift*, yaitu menggeser ketergantungan pembiayaan dari APBN ke sumber non-APBN, namun belum cukup kuat sebagai pengungkit utama peningkatan mutu pendidikan secara sistemik. Secara keseluruhan, hasil skoring menunjukkan bahwa kebijakan yang berorientasi pada penguatan kualitas sumber daya manusia pendidik dan pendukung pembelajaran memiliki prioritas tertinggi dibandingkan intervensi yang bersifat struktural-finansial semata. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan kelautan dan perikanan membutuhkan pendekatan terintegrasi yang menempatkan human capital sebagai fondasi utama, dengan dukungan infrastruktur, tata kelola, dan pembiayaan yang selaras dan saling memperkuat.

Kebijakan Prioritas: Peningkatan Kompetensi dan Distribusi Pendidik

Berdasarkan hasil penilaian prioritas kebijakan, fokus intervensi diarahkan pada peningkatan kompetensi dan distribusi pendidik serta tenaga kependidikan sebagai kebijakan utama. Rasionalisasi pemilihan ini bertumpu pada konsep *leverage point*, yaitu titik intervensi yang mampu menghasilkan perubahan sistemik paling besar dengan penggunaan sumber daya yang relatif efisien. Dalam sistem pendidikan, pendidik merupakan aktor kunci yang memengaruhi kualitas proses pembelajaran, efektivitas pemanfaatan sarana prasarana, serta keberhasilan implementasi kurikulum berbasis kompetensi.

Dalam perspektif ekonomi pendidikan, pendidik yang kompeten berperan meningkatkan *marginal productivity* dari seluruh input pendidikan lainnya. Kurikulum yang baik, teknologi pembelajaran yang canggih, dan fasilitas modern tidak akan memberikan hasil optimal tanpa kapasitas pendidik yang mampu mengintegrasikan seluruh elemen tersebut ke dalam proses belajar yang bermakna. Oleh karena itu, investasi pada peningkatan kompetensi pendidik memiliki *return on investment* yang lebih tinggi dibandingkan pembangunan fisik masif yang bersifat kapital-intensif dan berisiko menjadi *stranded assets* apabila tidak didukung sumber daya manusia yang memadai.

Selain aspek kompetensi, dimensi distribusi pendidik menjadi krusial dalam konteks keadilan sosial dan pembangunan wilayah. Ketimpangan distribusi pendidik antara wilayah barat dan timur Indonesia telah menciptakan kesenjangan kualitas pendidikan maritim. Kebijakan redistribusi pendidik

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

yang dirancang secara sistematis tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemerataan, tetapi juga sebagai strategi pembangunan ekonomi wilayah pesisir dan kawasan 3T

Model Logika Implementasi Kebijakan

Untuk memastikan kebijakan prioritas ini dapat diimplementasikan secara efektif dan terukur, disusun *Logic Model* sebagai kerangka kerja yang memetakan hubungan kausal antara sumber daya, aktivitas, hasil, dan dampak kebijakan.

Pada tahap input, kebijakan ditopang oleh penyusunan regulasi standar kompetensi pendidik yang selaras dengan kebutuhan industri perikanan global, alokasi anggaran khusus untuk pelatihan dan sertifikasi, pemanfaatan teknologi *e-learning* dan *learning management system*, serta rekrutmen sumber daya manusia dengan keahlian spesifik yang dibutuhkan sektor maritim. Input ini menjadi fondasi institusional dan finansial bagi pelaksanaan program. Tahap activities mencakup pelaksanaan pelatihan intensif berbasis digital melalui skema *Training of Trainers* (ToT), penerapan sertifikasi kompetensi wajib yang mengacu pada standar industri, redistribusi pendidik ke wilayah 3T dengan skema insentif yang jelas, serta penguatan kemitraan dengan industri melalui program magang dosen dan *industrial attachment*. Aktivitas ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan praktik industri nyata.

Sebagai hasil langsung (*output*), diharapkan terjadi peningkatan persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang tersertifikasi, tercapainya rasio dosen–mahasiswa yang lebih seimbang antarwilayah, serta tersusunnya revisi kurikulum yang berbasis kompetensi dan kebutuhan industri. Output ini menjadi indikator kinerja jangka pendek yang dapat diukur secara kuantitatif. Pada level outcome atau dampak menengah, kebijakan ini ditargetkan menghasilkan lulusan yang memiliki sertifikasi kompetensi yang diakui secara global, peningkatan status akreditasi institusi pendidikan menjadi peringkat "Unggul", serta percepatan penyerapan lulusan di dunia usaha dan industri. Outcome ini mencerminkan peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan maritim secara substantif. Dalam jangka panjang (*long-term impact*), implementasi kebijakan diharapkan berkontribusi pada peningkatan produktivitas sektor perikanan nasional, pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir, serta penguatan posisi Indonesia dalam mewujudkan Visi Indonesia 2045 sebagai Poros Maritim Dunia. Dampak ini menempatkan pendidikan sebagai pilar strategis pembangunan ekonomi maritim berkelanjutan.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi sektor kelautan dan perikanan menuju capaian status "Unggul" memerlukan intervensi kebijakan yang bersifat strategis dan transformatif, melampaui pendekatan perbaikan teknis dan administratif semata. Hasil analisis menunjukkan bahwa persoalan utama yang menghambat peningkatan mutu bukan terletak pada desain kurikulum atau regulasi formal, melainkan pada permasalahan struktural yang memiliki dimensi sosial ekonomi yang kuat, khususnya terkait kualitas dan distribusi sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan.

Temuan empiris mengindikasikan bahwa ketimpangan kompetensi dan sebaran pendidik antarwilayah, keterbatasan penguasaan teknologi, serta belum optimalnya mekanisme pengembangan kapasitas berkelanjutan telah menurunkan efektivitas investasi pendidikan secara keseluruhan. Dalam konteks tersebut, kebijakan peningkatan kompetensi dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan melalui skema sertifikasi wajib berbasis industri dan penguatan literasi teknologi terbukti sebagai strategi dengan tingkat efektivitas dan efisiensi tertinggi dibandingkan alternatif kebijakan lainnya. Investasi pada kapasitas pendidik merupakan *leverage point* utama yang mampu meningkatkan produktivitas seluruh sistem pendidikan, mulai dari proses pembelajaran hingga kualitas lulusan. Pendidik yang kompeten dan adaptif berperan sebagai katalis dalam mencetak sumber daya manusia maritim yang berdaya saing global, berkarakter inovatif, dan responsif terhadap dinamika industri perikanan modern. Dalam jangka panjang, penguatan human capital melalui pendidikan yang unggul akan menjadi fondasi penting bagi pengembangan ekonomi biru Indonesia yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat pesisir.

Implikasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan tinggi kelautan dan perikanan harus diarahkan pada transformasi sistemik yang bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu penguatan kualitas, pemerataan distribusi, dan penguatan tata kelola pendidik dan tenaga kependidikan, yang diintegrasikan secara simultan dalam kerangka kebijakan berjenjang dan berbasis kinerja. Penguatan kualitas dilakukan melalui standarisasi kompetensi berbasis kebutuhan industri, akselerasi sertifikasi profesional, penguasaan teknologi pembelajaran digital, serta implementasi *continuous professional*

development yang terstruktur, sehingga mampu meningkatkan kapabilitas adaptif pendidik terhadap dinamika sektor perikanan modern. Secara paralel, pemerataan distribusi perlu diwujudkan melalui mekanisme redistribusi berbasis *needs assessment* institusional yang didukung skema insentif afirmatif bagi wilayah 3T, guna mengoreksi ketimpangan spasial yang selama ini menurunkan efektivitas sistem pendidikan. Sementara itu, penguatan tata kelola menjadi prasyarat kunci melalui penerapan sistem manajemen kinerja yang terukur, akuntabel, dan berorientasi pada output–outcome, sehingga seluruh intervensi kebijakan dapat dimonitor dan dievaluasi secara objektif. Dalam konteks implementasi, kerangka ini harus diterjemahkan secara konsisten dari level strategis melalui regulasi yang menetapkan standar kompetensi, kewajiban sertifikasi, integrasi teknologi, dan skema insentif ke level operasional dalam bentuk pedoman teknis yang rinci terkait pelatihan, sertifikasi, redistribusi, serta sistem monitoring dan evaluasi berbasis data. Efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada penguatan ekosistem kolaboratif lintas sektor yang melibatkan pemerintah, institusi pendidikan, industri, lembaga sertifikasi, dan aktor pembiayaan untuk memastikan keselarasan antara kebutuhan pasar kerja dan output pendidikan sekaligus menjamin keberlanjutan program. Secara agregat, intervensi ini tidak hanya meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan bermutu bagi masyarakat pesisir, tetapi juga menghasilkan lulusan yang lebih produktif, adaptif, dan kompetitif, sehingga memperkuat daya saing industri perikanan nasional dan menjadi fondasi utama bagi akselerasi ekonomi biru Indonesia yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pengetahuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan serta Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan atas dukungan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini. Apresiasi juga diberikan kepada para narasumber dan peserta diskusi kelompok terfokus yang telah memberikan masukan substantif dalam perumusan analisis dan rekomendasi kebijakan. Semoga kontribusi yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia kelautan dan perikanan di Indonesia.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Pernyataan ini menegaskan bahwa kontribusi penulis dalam karya ilmiah dengan judul Kebijakan Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan: Strategi Akselerasi Status Unggul Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan Berbasis Analisis Sosial Ekonomi adalah Suryat Dedie Susena sebagai kontributor utama.

DAFTAR PUSTAKA

Badriyah, S. L. (2022). Problematika Tenaga Pendidik di Indonesia. *Jurnal Kompasiana*.

Bardach, E. (2012). *A Practical Guide For Policy Analysis: The Eightfold Path To More Effective Problem Solving* (4th ed.). Washington, DC: Sage.

Chandra, Y. U. (2025). *Implementasi Kerangka Kerja Tata Kelola Data untuk Transformasi Organisasi Pendidikan Tinggi di Indonesia*. Jakarta: SIS Binus University.

Darmawan, I. P. A., Arifudin, O., Renaldi, R., Rianita, N. M., Octavianus, S., Candra, L., & Kusumastuti, D. (2021). *Total Quality Management Dalam Dunia Pendidikan*" Model, Teknik dan Impementasi". Bandung: Widina Bhakti Persada.

Euler, D. (2013). *Germany's Dual System: A Success Model?* Germany: Technical University of Munich.

Fitz-Enz, J. (2000). *The ROI of Human Capital: Measuring the Economic Value of Employee Performance*. New York: AMACOM.

Kadin Jateng. (2024). Pelatihan Kurikulum Berbasis Industri: Membangun Jembatan Antara Pendidikan dan Dunia Kerja. *Portal Vokasi Indonesia*.

Kasmawati, Y. (2017). Human Capital dan Kinerja Karyawan. *Jurnal Business, Applied Economics*, 3(4).

Knowlton, L. W., & Phillips, C. C. (2013). *The Logic Model Guidebook*. USA: SAGE Publications, Inc.

Nelliraharti, & Jarmita, N. (2025). *Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.

Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan. (2024). *Laporan Data Akreditasi dan Monitoring Evaluasi 2019-2023*. Jakarta: KKP.

Stenström, M-L., & Laine, K. (2011). Vocational Education and Training in Finland: Emerging Trends. *European Journal of Education*.

Suryadi, A. (2025). Pendidikan di Tengah Efisiensi Anggaran: Tantangan dan Solusi untuk Masa Depan Bangsa. *Khittah.Co*.

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

The SMERU Research Institute. (2023). *Laporan Tahunan 2022*. Jakarta: The SMERU Research Institute.

Valentine, R. Y. (2024). Membangun SDM Sektor Kelautan dan Perikanan Unggul di Indonesia Timur. *Info Akuakultur*.